

BAB 4

VISI, MISI, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INVESTASI

4.1. Visi dan Misi

Sebagai salah satu instrumen pembangunan Papua Barat, visi dan misi pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat mengacu kepada visi Papua Barat yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Papua Barat yang bersatu, berpendidikan dan berbudaya serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang demokratis, adil, sejahtera dan mandiri”.

Isu pokok/strategis pembangunan Papua Barat juga menjadi landasan pengembangan wilayah dan investasi di Provinsi Papua Barat, yaitu

1. Kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
2. Pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Papua Barat
3. Daya saing Provinsi Papua Barat
4. Penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. Menjamin kepastian hukum

Kelima isu pokok ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tidak cukup terjadi di beberapa kawasan saja, namun harus merata di seluruh wilayah Papua Barat. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Papua Barat dalam mengembangkan dan mengelola sumberdaya yang ada. Jumlah dan kualitas produksi yang tinggi diharapkan berdampak pada daya saing Papua Barat semakin meningkat hingga ke tingkat yang paling tinggi.

Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan Provinsi Papua Barat secara umum. Oleh karena itu, visi pengembangan wilayah dan investasi Papua Barat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya pengembangan wilayah dan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pengembangan Wilayah dan Investasi Papua Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Menyebarluaskan penerapan pendekatan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian Papua Barat di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan pemerataan/mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Papua Barat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan keterkaitan infrastruktur dasar antar wilayah Provinsi Papua Barat dan secara nasional.
6. Mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan peraturan perundangan antar hirarki pemerintahan.

4.2. Konsepsi Pengembangan Wilayah dan Investasi

Pengembangan wilayah dan investasi Provinsi Papua Barat perlu mengacu pada konsep pengembangan yang menjadi kerangka dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan, serta arahan dan strategi pembangunan secara umum seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Provinsi Papua Barat. Konsep pengembangan wilayah dan investasi Provinsi Papua Barat ini terkait dengan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis pengembangan yang dihadapi seperti yang diuraikan pada bab 2 dan bab 3.

Isu pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah dan investasi adalah upaya-upaya yang dititik beratkan pada sub program prioritas, yakni pada bidang hukum yang penjabarannya sebagai berikut:

Pertama, tentang status tanah yang perlu dikaitkan dengan PERDA jual beli Tanah. Hal ini penting, sebab tanah merupakan indikator ketercapaian suatu pembangunan. Wilayah dan investasi merupakan integrasi antara masyarakat dan pemilik hak ulayat atau pemegang hak adat atas tanah. Bagaimana orang bisa berinvestasi sedangkan status tanahnya tidak jelas sehingga menciptakan kekuatiran bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Kedua, adalah faktor keamanan. Keamanan wilayah akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkembang sangat pesat.

Masyarakat dan pemerintah harus berpartisipasi aktif untuk membuat konsensus bersama dalam hal jual beli tanah dan menciptakan keamanan tanpa mengorbankan salah satu pihak. Kepastian hukum merupakan salah satu daya tarik dan sekaligus insentif yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada investor.

4.2.1. Keterkaitan Antar Kabupaten/Kota

Pertumbuhan dan kegiatan masyarakat (ekonomi, sosial dan budaya) cenderung terpusat di daerah yang relatif memiliki sumberdaya yang lebih baik sehingga seringkali menyebabkan daerah

yang kurang berkembang menjadi semakin tertinggal. Pembangunan wilayah seyogyanya dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dan bukan memperparahnya.

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disebabkan antara lain oleh kepemilikan sumberdaya dan aksesibilitas yang berbeda yang terkait juga dengan kondisi fisik geologis wilayah. Dengan mempertimbangkan bahwa investasi perlu dikembangkan sebagai penggerak pembangunan di tempat yang sukar ditumbuhkan, maka investasi dapat menjadi salah satu alat dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, terutama kabupaten-kabupaten baru dan daerah-daerah terpencil dan belum berkembang.

Investasi merupakan sektor yang relatif dapat dikembangkan di mana saja, dengan menciptakan daya tarik dan aksesibilitas, serta mengefektifkan promosi kepada sektor swasta yang menjadi sasaran. Pengembangan ini tentu saja harus tetap mengacu pada rambu-rambu pembangunan dan norma-norma budaya. Atas dasar tersebut, maka pengembangan wilayah dan investasi Provinsi Papua Barat harus berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah baik antar kabupaten/kota, antara daerah perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan yang belum berkembang dan sebagainya. Prinsip pengurangan ketimpangan ini di Provinsi Papua Barat dapat diwujudkan melalui dua upaya pokok berikut :

1. Memprioritaskan pengembangan wilayah dan investasi di daerah-daerah yang relatif belum berkembang, khususnya kabupaten-kabupaten baru, daerah pedesaan, dan tidak memprioritaskan pengembangan di daerah yang sudah maju.
2. Memprioritaskan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana jalan di kawasan yang belum berkembang namun berpotensi untuk menjadi unggulan.

Sesungguhnya pemberian prioritas pengembangan wilayah dan investasi kepada salah satu kabupaten/kota bukan juga hal yang mudah. Perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan pada tingkat nasional yakni bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi telah menghasilkan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota. Otonomi daerah sering terimplementasi sebagai legitimasi politik sebuah kabupaten/kota yang lebih maju untuk terus tumbuh dan berkembang, sehingga berdampak pada ketimpangan kemajuan yang semakin melebar dengan kabupaten/kota yang sejak semula tertinggal. Salah satu alternatif untuk mengatasi ketimpangan kemajuan yang cenderung melebar antar kabupaten/kota, berbagai pihak perlu memahami dengan seksama tentang adanya hierarki pemerintahan yang lebih tinggi dari kabupaten/kota yakni propinsi.

Propinsi berdasarkan pembagian administratif pemerintahan yang berlaku terdiri dari sejumlah kabupaten/kota. Di antara subsistem/kabupaten/kota yang satu dengan subsistem/kabupaten/kota yang lain memiliki keterkaitan yang kuat sebagai refleksi semangat dan rasa solidaritas sesama kabupaten/kota dalam satu propinsi.

Kaitan yang kuat antar kabupaten/kota akan menghasilkan suatu sifat sistem yang khas dan nyata. Secara khas sistem ini akan memberikan tanggapan (respons) apabila ia mendapat rangsangan dari luar, meskipun rangsangan itu terbatas diberikan kepada salah satu kabupaten/kota, Keterkaitan antar kabupaten/kota hendaknya diberi fokus pada upaya untuk membangun

komitmen bersama pemangku kepentingan, dan merumuskan rencana untuk merealisasikan komitmen pengembangan wilayah dan investasi.

Konsepsi keterkaitan antar kabupaten/kota dalam pengembangan wilayah dan investasi adalah memperkecil ketimpangan kemajuan atau mendorong kemajuan bersama yang serasi antar kabupaten/kota melalui pembangunan komitmen bersama dan perencanaan bersama. Kebersamaan terutama memberi fokus pada pembangunan bidang/sector-sector yang relevan sesuai kebutuhan bersama kabupaten/kota. Di antara bidang/sector-sector itu adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur kesejahteraan sosial tertentu yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan wilayah dan investasi. Dibidang infrastruktur ekonomi, misalnya pembangunan outlet (pintu gerbang keluar) untuk suatu komoditas ekspor setelah mempertimbangkan faktor teknis dan ekonomis adalah cukup satu unit untuk melayani beberapa kabupaten/kota. Dibidang infrastruktur kesejahteraan sosial, misalnya pendidikan tinggi tidak perlu dibangun di setiap kabupaten/kota setelah mempertimbangkan efisiensi penggunaan input di samping mempertimbangkan kualitas output yakni sumberdaya manusia yang berkualitas.

Untuk merealisasikan secara nyata keterkaitan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat perlu dilakukan upaya-upaya sistematis, seperti di bawah ini.

- 1). Konsolidasi seluruh kabupaten/kota dalam rangka membangun komitmen untuk maju bersama, tetapi tetap serasi dan berkeadilan sesuai potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota.
- 2). Merumuskan rencana pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur kesejahteraan sosial terpadu antar kabupaten/kota dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama secara efisien.
- 3). Melakukan pengendalian pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur kesejahteraan sosial terpadu antar kabupaten/kota dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama secara efektif.
- 4). Melakukan evaluasi penyelenggaraan pembangunan pada setiap akhir tahun anggaran pada setiap tahapan pembangunan baik tahapan konstruksi sampai dengan tahapan operasional infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur kesejahteraan sosial.
- 5). Melakukan penajaman rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan hingga tercapai tujuan bersama kabupaten/kota untuk maju bersama.

Aparat pemerintahan di semua kabupaten/kota, seluruh sektor dan pihak yang terkait, termasuk para pengambil keputusan, harus mendukung dan memberikan komitmen yang terus menerus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah Provinsi Papua Barat. Dengan konsep ini pengembangan wilayah dan investasi menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Papua Barat.

Isu pokok sub program prioritas pembangunan daerah diitik beratkan pada Bidang Bina Marga dalam butir 5 menyebutkan membangun jalan trans Papua Barat yang menghubungkan Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan Fakfak. Membangun jalan yang menghubungkan Kampung dan distrik, dan jalan yang menghubungkan distrik dengan ibu kota kabupaten/Provinsi. Membangun bandara dan jembatan serta dermaga pada 8 kabupaten dan 1 Kota. Untuk

transportasi laut pengadaan kapal mini/khusus ekspres untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota.

4.2.2. Keterkaitan Antar Sektor

Pengembangan wilayah dan investasi daerah memandang sektor-sektor sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Sektor ekonomi yang utama di suatu wilayah perlu dikembangkan dalam kerangka saling melengkapi dan mendukung dengan sektor lain.

Pembangunan sektor ekonomi sangat multisektoral dan tidak dapat maju dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan dari sektor lain. Dilain pihak, sektor lain pun dapat memanfaatkan sektor ekonomi untuk bersinergi secara positif sehingga saling mendukung dan menguntungkan. Dengan kreativitas dan inovasi perencanaan, pembangunan sektor ekonomi dapat dikembangkan seiring dengan sektor lainnya tanpa harus memunculkan konflik antar sektor.

Oleh karena itu pengembangan wilayah dan investasi di Provinsi Papua Barat harus:

- 1) Dikaitkan dan diselaraskan dengan sektor ekonomi dasar yang berkembang atau berpotensi di daerah/kawasan yang bersangkutan.
- 2) Secara kreatif menggali potensi, baik yang tangible (teraba) maupun intangible (tak teraba) dari potensi sumberdaya sektor-sektor di dalam kawasan.
- 3) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan sektor lain dalam berbagai tahapan perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan serta dengan jelas menguraikan 'siapa melakukan apa' di antara sektor-sektor yang ada dalam pemerintahan, pihak swasta, masyarakat, dan stakeholders pembangunan lainnya.

Dengan konsep ini RPWI Provinsi Papua Barat diharapkan menjadi alat pemersatu sektor-sektor pembangunan wilayah dan investasi, serta mengurangi potensi konflik kepentingan antar sektor .

Masyarakat dibutuhkan proaktif dalam pergerakan perekonomian yang dicanangkan pemerintah, misalnya disetiap daerah distrik ada sektor perbankan untuk masyarakat bisa menabung hasil pendapat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan yang ada di distrik dilihat dari populasi penduduk. Kalau penduduknya cukup banyak, maka pemerintah bisa memfasilitasi satu unit Kantor bank untuk melayani masyarakat, dan sekaligus menyadarkan masyarakat untuk memiliki sifat menabung.

4.2.3. Prinsip-Prinsip Ekologi Untuk Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial, serta selaras dengan nilai budaya. Potensi sumberdaya Provinsi Papua Barat yang tersebar tidak merata, serta kondisi lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi yang beragam menyebabkan pembangunan yang sesuai dengan kerangka pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menjadi tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Lebih spesifik lagi Wilayah Provinsi Papua Barat merupakan sebuah ekosistem alam yang termasuk dalam kategori wilayah sensitif dengan intervensi atau kegiatan ekonomi. Hal ini terlihat dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat ini ternyata lebih dari 50 persen wilayah daratannya ditetapkan sebagai daerah konservasi atau daerah pencagaran. Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten kepulauan, ternyata 77 persen wilayahnya terdiri dari perairan laut, dan 23 persen sisanya merupakan daratan, serta 72 persen dari luas wilayah daratan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung atau kawasan pencagaran. Lebih buruk lagi di Kabupaten Teluk Wondama, yakni 97 persen dari wilayah daratan telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau kawasan pencagaran.

Di dalam kawasan daratan dengan luas terbatas ini hidup penduduk lokal yang jumlahnya cukup besar, yakni 36.510 jiwa di Kabupaten Raja Ampat, dan 20.414 jiwa di Kabupaten Teluk Wondama. Data ini memberi gambaran tentang betapa lebih pentingnya pencagaran ketimbang pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Idealnya pencagaran dan pembangunan ekonomi hendaknya diarahkan kepada tujuan yang sama, yakni penggunaan sumberdaya alam yang bijaksana untuk mencapai kualitas hidup umat manusia secara optimal. Kenyataannya, pembangunan ekonomi cenderung lebih menekankan pada kenaikan kualitas produksi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan materi penduduk. Sebaliknya, pencagaran selain memberi fokus pada hasil kuantitatif yang lestari, ternyata lebih menekankan pada pengelolaan aspek kualitas lingkungan manusia yang dapat menambah arti kehidupan umat manusia.

Konflik antara pencagaran dan pembangunan ekonomi dapat diperkecil jika terdapat pengertian dan kerjasama di antara mereka yang memiliki kepentingan utama yang berbeda. Pencagaran maupun pembangunan ekonomi adalah sangat penting untuk mempertimbangkan aturan-aturan fisik maupun biologi yang berlaku bagi semua kehidupan di bumi. Aturan-aturan inilah yang merupakan materi pokok pengetahuan tentang ekologi, yakni hubungan antara organisme dan lingkungannya. Pertimbangan terhadap prinsip-prinsip ekologi yang tepat akan membantu mereka yang terlibat dengan upaya pencagaran dan pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuannya dengan dampak negatif yang kecil terhadap lingkungan. Dampak lanjutnya adalah terkendalinya sumber dampak yang berbahaya terhadap semua kehidupan di suatu kawasan.

Prinsip ekologi untuk pembangunan ekonomi pada dasarnya sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan kesamaan ini, pengembangan wilayah dan investasi yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat berprinsip pada hal-hal berikut :

Terjaminnya kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Terintegrasinya pengembangan wilayah dan investasi Provinsi Papua Barat dengan lingkungan alam, ekonomi, dan sosial-budaya, serta menjamin dampak perubahan yang bersumber dari kegiatan pengembangan wilayah dan investasi mampu berinteraksi dengan struktur sosial-ekonomi dan budaya masyarakat.

Terpadunya perencanaan pengembangan wilayah dan investasi yang berbasis masyarakat lokal di Provinsi Papua Barat yang disusun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terutama Departemen Kehutanan, dan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dengan konsep ini

Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi Provinsi Papua Barat menjadi alat untuk keberlanjutan sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat.

United Nation Environment Programme (UNEP) menyusun prinsip-prinsip dasar pembangunan yang Berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan "*sustainable development*" terdiri dari tiga aspek yang saling berkaitan: lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi. Karena sifatnya yang '*berlanjut*' maka pembangunan yang berkelanjutan mencakup pelestarian keanekaragaman hayati; minimalisasi dampak ekologis, sosial dan budaya; dan komunitas lokal. Berdasarkan konsepsi ini, prinsip-prinsip pengembangan wilayah dan investasi daerah yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan RPWI ke dalam kebijakan umum pembangunan berkelanjutan agar pengembangan wilayah dan investasi selaras dengan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup nasional maupun regional.
2. Pengembangan berkelanjutan harus didukung dua komponen penting, yaitu perencanaan, serta pengaturan dan standar. Perencanaan memastikan keselarasan rencana pengembangan dengan rencana-rencana lain dalam dimensi ruang yang lebih luas dan dimensi waktu yang lebih panjang. Penyusunan peraturan dan standar memberikan kerangka hukum dan koridor yang jelas dalam membangun.
3. Pengelolaan pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk menjaga konsistensi pengembangan melalui kerjasama dan inisiatif seluruh sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pelibatan langsung komunitas lokal, melakukan pemantauan, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Sukses tidaknya bergantung dari konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan RPWI yang sudah disusun dan terus menerus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran informasi mengenai pembangunan yang berkelanjutan.

Berbicara prinsip-prinsip ekologi dalam keterkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka kita melihat 3 aspek, yaitu aspek wilayah, aspek masyarakat, dan aspek budaya. Ketiga aspek ini saling terkait dan berkesinambungan satu sama lain. Aspek wilayah meliputi dataran tinggi (highland) dan dataran rendah (lowland) dan juga pesisir dan kepulauan. Karakteristik dari setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan juga faktor budaya yang terintegrasi dengan lingkungannya.

4.2.4. Konsep Hierarki dan Penjenjangan Kawasan Pengembangan

Kapasitas masing-masing wilayah dan masyarakat Provinsi Papua Barat untuk berkembang berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi fisik wilayah dan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka diperlukan konsep stratifikasi atau penjenjangan, yang membagi kawasan pengembangan Provinsi Papua Barat menurut jangkauan atau skala jangkauan, baik fisik maupun ekonomi.

Konsep penjenjangan dalam pengembangan wilayah Papua Barat dilakukan dengan:

1. Membagi skala pengembangan wilayah menjadi kawasan (i) skala lokal yang mencakup wilayah yang kecil di dalam wilayah kawasan, (ii) skala kabupaten/kota dan (iii) skala provinsi serta skala nasional
2. Membedakan bentuk pengembangan suatu wilayah tergantung pada karakteristik potensial untuk setiap skala yang dimiliki. Dengan konsep penjenjangan ini maka kawasan pengembangan di Provinsi Papua Barat akan memiliki perbedaan skala dan prioritas pengembangan.